

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk, Menganalisis pelaksanaan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Menganalisis kelemahan-kelemahan pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dalam perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dan merekonstruksi hukum pengampunan pajak yang berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini masuk dalam kategori yuridis empiris karena penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan dan kelemahan dari penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang kemudian penelitian ini berusaha menemukan rekonstruksi baru dari pengampunan pajak yang berbasis pada nilai keadilan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kebijakan tax amnesty meskipun disatu sisi dianggap mencederai keadilan terhadap wajib pajak patuh, tetapi kebijakan tersebut harus dipandang dari asas manfaat, bahwa tujuan tax amnesty dalam jangka panjang adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak melalui perluasan wajib pajak dan penatan basis administrasi pajak. Kelemahan Tax Amnesty antara lain : 1. Dianggap mencederai asas keadilan. 2. Tax amnesty dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten dan 3. Tax Amnesty Hanya Beri "Karpas Merah" bagi Koruptor. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945/prinsip konstitusionalisme dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tax amnesty dalam jangka pendek bertujuan untuk mendapat penerimaan pajak melalui uang tebusan dan untuk jangka panjang meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat..

Kata kunci : Pengampunan Pajak, Rekonstruksi

## **ABSTRACT**

This study aims to, Analyze the implementation of tax amnesty (tax amnesty) in the perspective of Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. Analyze the weaknesses of the implementation of tax amnesty in the perspective of Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. And reconstruct the law of tax amnesty based on the value of justice. This type of research is qualitative research. This study is included in the empirical juridical category because this study will examine the implementation and weaknesses of the application of Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, which later this study sought to find a new reconstruction of tax amnesty based on the value of justice. While the evaluation is carried out on the data with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that 1. Tax amnesty policy although on the one hand it is considered injuring justice towards compliant taxpayers, but the policy must be viewed from the principle of benefit, that the purpose of tax amnesty in the long run is to increase state revenue from the tax sector through expansion of taxpayers and compliance with the basis tax administration. Weaknesses of Tax Amnesty include: 1. It is considered to injure the principle of justice. 2. It is feared that Tax Amnesty will not run consistently and 3. Tax Amnesty Only Gives "Red Carpet" for Corruptors. Law Number 11 of 2016 concerning tax amnesty with the procedures for establishing good laws and regulations based on the 1945 Constitution / constitutionalism principles and Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Tax amnesty in the short term aims to get tax revenue through ransom and in the long run increases tax revenue based on a complete and accurate database.

Keywords: Tax Amnesty, Reconstruction.